

BAB II

DINAMIKA KELUARGA PASCA PERCERAIAN

2.1. Konsep Perceraian dan Aspek Sosial–Ekonomi–Politik dalam Keluarga Indonesia

2.1.1. Konsep Perceraian di Indonesia

Perceraian merupakan proses hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan istri melalui putusan pengadilan yang sah (Azwir, Pagar, & Nasution, 2022). Dalam konteks Indonesia, perceraian tidak hanya memutus hubungan hukum, tetapi juga membawa dampak sosial yang signifikan terhadap struktur keluarga, dinamika komunikasi, serta kesejahteraan anak. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perceraian berpotensi mengubah stabilitas fungsi keluarga dan menyebabkan penurunan kualitas relasi antara anggota keluarga (PPPA, 2020). Tren ini memperlihatkan bahwa perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.

2.1.2. Konsep Perceraian di Indonesia

Data terbaru menunjukkan bahwa perceraian di Indonesia masih merupakan fenomena sosial yang signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, pada periode 2019–2024, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri mendominasi dengan persentase lebih dari 70–85% dari total kasus perceraian. Hal ini menunjukkan adanya dinamika sosial baru dalam keluarga

Indonesia, termasuk meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan dan kesadaran hukum dalam mengajukan gugatan.

2.1.3. Aspek Ekonomi Dalam Konsep Perceraian

Dari sisi ekonomi, perceraian sering mengakibatkan ketidakstabilan finansial, terutama ketika satu pihak kehilangan hak nafkah atau pembagian harta tidak berjalan adil. Banyak keluarga pasca perceraian yang mengalami penurunan taraf hidup karena hanya mengandalkan satu sumber penghasilan (Bukido, 2025). Di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020), mencatat bahwa sekitar 40% ibu tunggal pasca perceraian hidup di bawah garis kemiskinan, yang berdampak pada kualitas hidup anak. Tekanan ekonomi ini dapat memperburuk kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak secara emosional dan material, sehingga memengaruhi kemampuan mereka berkomunikasi dan menjaga hubungan yang sehat.

Selain itu, dalam konteks pernikahan, stabilitas ekonomi biasanya menjadi salah satu pilar penting yang memungkinkan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, mengelola peran, serta menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Ketika perceraian terjadi, struktur ekonomi keluarga mengalami perubahan drastis karena pendapatan yang sebelumnya dikelola bersama harus dipecah menjadi dua rumah tangga yang berbeda. Kondisi ini menempatkan anak pada posisi yang rentan, terutama ketika orang tua tunggal menghadapi kesulitan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan finansial dan pengasuhan (Setiawan, et.al, 2024).

Dengan banyak kasus penurunan pendapatan, tentu menyebabkan anak harus beradaptasi dengan perubahan gaya hidup, keterbatasan akses pendidikan,

pengurangan fasilitas keseharian, hingga ketidakstabilan tempat tinggal. Situasi tersebut dapat mengganggu rasa aman psikologis anak dan menciptakan tekanan emosional yang memengaruhi cara mereka berkomunikasi, baik dengan orang tua maupun lingkungan sosialnya. Anak mungkin merasa enggan meminta kebutuhan, khawatir membebani orang tua, atau mengalami kecemasan ketika melihat orang tua berjuang secara ekonomi (Yunasril, et.al, 2024). Dengan demikian, aspek ekonomi menjadi salah satu faktor paling signifikan dalam membentuk pengalaman anak pasca perceraian, karena kondisi finansial keluarga turut menentukan kualitas relasi, intensitas komunikasi, dan kapasitas orang tua dalam menjaga stabilitas emosional anak selama masa transisi keluarga.

Sehingga perubahan struktur penghasilan dalam keluarga pasca perceraian membuat anak berada pada posisi rentan secara ekonomi karena akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar sering kali menurun. Hilangnya dukungan finansial dari salah satu orang tua atau ketidakteraturan pemberian nafkah memperbesar risiko ketimpangan kesejahteraan anak. Dalam konteks keluarga, kondisi ini semakin berat apabila orang tua tidak memiliki pekerjaan tetap, tingkat pendidikan rendah, atau tidak mendapat dukungan sosial yang memadai. Akibatnya, anak tidak hanya menghadapi ketidakpastian ekonomi, tetapi juga stres psikososial yang muncul dari perubahan drastis dalam pola hidup dan kualitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Amanda & Muktarruddin, 2024).

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, aspek ekonomi menjadi faktor penting dalam memahami dampak perceraian terhadap dinamika keluarga, khususnya bagi anak. Penurunan stabilitas finansial akibat berkurangnya

sumber pendapatan, ketidakpastian nafkah, serta ketimpangan pembagian harta sering menempatkan keluarga pascaperceraian dalam kondisi rentan. Situasi ekonomi yang tertekan ini tidak hanya memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas komunikasi dalam keluarga. Orang tua yang menghadapi beban finansial berlebih cenderung mengalami stres, kelelahan, atau konflik internal yang kemudian mengurangi kapasitas mereka untuk menjalin komunikasi yang hangat, responsif, dan konsisten dengan anak. Bagi anak, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menimbulkan kecemasan, rasa tidak aman, serta kebutuhan akan kejelasan dan kepastian dari orang tua, sehingga komunikasi menjadi semakin penting namun sering terhambat. Dengan demikian, aspek ekonomi perceraian bukan hanya memengaruhi kesejahteraan material, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk pola komunikasi, relasi emosional, dan proses penyesuaian anak dalam keluarga pascaperceraian.

2.1.4. Aspek Politik dan Hukum Dalam Konsep Perceraian

Secara politik dan hukum, perceraian di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan perlindungan anak dalam proses perceraian. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya mempertimbangkan kompleksitas komunikasi keluarga pasca perceraian. Putusan pengadilan terkait hak asuh sering kali masih berorientasi pada aspek legal formal, sehingga kebutuhan emosional anak kurang dipertimbangkan (Ulfiana, 2025). Konflik politik dalam keluarga juga dapat muncul, seperti perebutan pengaruh antara ayah

dan ibu, yang menimbulkan tekanan emosional pada anak dan mengganggu hubungan mereka dengan salah satu orang tua. Selain itu, program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan keluarga bercerai, terutama dalam aspek psikososial dan komunikasi pasca perceraian (PPPA, 2020).

Sehingga dalam hal tersebut secara politik dan hukum, kerangka regulasi perceraian di Indonesia berupaya memberikan perlindungan bagi anak melalui penetapan hak asuh, pengaturan nafkah, dan mekanisme peradilan yang menjamin kepentingan terbaik anak. Namun, realitas implementasi sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan praktik. Dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa proses hukum perceraian masih didominasi pendekatan administratif dan legalistik. Sehingga hal inilah yang menjadikan aspek komunikasi keluarga seperti kebutuhan anak untuk tetap menjalin hubungan berkualitas dengan kedua orang tua belum menjadi prioritas utama dalam pertimbangan hakim. Akibatnya, keputusan formal terkait hak asuh maupun pengaturan kunjungan kadang tidak mampu menjawab kebutuhan emosional anak.

Selain itu, dinamika politik dalam keluarga pascaperceraian dapat muncul dalam bentuk perebutan pengaruh antara kedua orang tua. Ketika masing-masing pihak berusaha memperoleh legitimasi atau kontrol atas pengasuhan, anak sering kali berada pada posisi sulit karena harus menavigasi hubungan dengan kedua orang tuanya. Situasi ini menciptakan ketegangan emosional dan berpotensi menghambat terciptanya komunikasi yang sehat. Konflik berkepanjangan antar

orang tua tidak hanya menjadi masalah interpersonal, tetapi juga dapat memengaruhi kepatuhan mereka terhadap putusan hukum, seperti pengaturan waktu bertemu atau pembagian tanggung jawab pengasuhan (Sebriyani, 2023).

Sementara itu, dukungan kebijakan pemerintah terhadap keluarga pascaperceraian masih cenderung berfokus pada aspek ekonomi. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya mengintegrasikan dukungan terhadap kebutuhan psikososial anak, termasuk dalam hal rekonstruksi hubungan keluarga setelah perceraian. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rismania, 2019) yang menunjukkan bahwa, pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek hukum, ekonomi, dan komunikasi keluarga sangat penting untuk memastikan kesejahteraan anak dalam jangka panjang. Tanpa dukungan kebijakan yang komprehensif, banyak keluarga bercerai menghadapi kesulitan untuk mengembangkan pola komunikasi yang stabil dan saling mendukung. Selain itu (Pangestu, 2022) mengungkapkan bahwa, keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan konseling keluarga juga menjadi tantangan bagi banyak keluarga, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Ketidaktahuan mengenai hak-hak hukum, prosedur penyelesaian sengketa, maupun layanan mediasi membuat proses perceraian sering berlangsung tidak terarah dan penuh konflik. Ketiadaan fasilitas konsultasi keluarga sebelum maupun sesudah perceraian menyebabkan orang tua dan anak kesulitan beradaptasi, termasuk dalam membangun pola komunikasi baru yang lebih fungsional. Oleh karena itu, aspek politik dan hukum perceraian perlu diarahkan

pada penguatan kebijakan yang tidak hanya mengatur proses peradilan, tetapi juga mendukung keberlanjutan hubungan anak dan orang tua pascaperceraian melalui pendekatan komunikasi yang lebih humanis dan responsif.

2.1.5. Aspek Geografis Dalam Konsep Perceraian

Aspek geografis menjadi salah satu faktor penting dalam memahami dinamika keluarga pascaperceraian. Menurut (Alwinda & Setyanto, 2021) menegaskan bahwa, faktor tempat tinggal setelah perceraian sering kali tidak terhindarkan, baik karena alasan ekonomi, pekerjaan, maupun keputusan pengadilan. Ketika salah satu orang tua umumnya ayah sebagai non-kustodian tinggal di lokasi yang jauh, intensitas interaksi dengan anak menjadi menurun. Jarak geografis ini tidak hanya memengaruhi frekuensi pertemuan fisik, tetapi juga berdampak pada ritme komunikasi sehari-hari, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas kedekatan emosional antara orang tua dan anak.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Fauzi, 2020) bahwa, kondisi geografis seperti perbedaan wilayah perkotaan dan pedesaan turut memengaruhi ketersediaan sarana pendukung untuk menjaga hubungan keluarga pascaperceraian. Di wilayah urban, akses terhadap teknologi komunikasi, transportasi, dan fasilitas publik lebih memadai, sehingga proses berkomunikasi dan mengatur pertemuan dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Sebaliknya, di wilayah pedesaan atau daerah yang jauh dari pusat kota, keterbatasan jaringan internet, biaya transportasi yang lebih tinggi, dan minimnya sarana pendukung membuat anak dan orang tua non-kustodian menghadapi tantangan tambahan dalam mempertahankan hubungan.

Mobilitas geografis orang tua juga menjadi faktor kunci. Banyak orang tua pascaperceraian berpindah pekerjaan atau menetap di kota lain karena tuntutan ekonomi. Mobilitas ini menciptakan pola relasi jarak jauh yang membutuhkan upaya tambahan untuk menjaga ritme komunikasi yang konsisten. Dalam konteks ini, teknologi komunikasi menjadi jembatan yang penting, namun tidak sepenuhnya mampu menggantikan kedekatan interaksi langsung. Perbedaan zona waktu, kesibukan, serta keterbatasan akses digital dapat mempersempit ruang komunikasi, terutama bagi anak yang masih berusia sekolah (Ghaisa, 2020).

Selain jarak fisik, aspek geografis juga mencakup lingkungan sosial budaya tempat anak dan orang tua tinggal. Ketika anak tinggal di wilayah dengan norma keluarga atau komunitas yang kuat, pola komunikasi pascaperceraian dapat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat sekitar terhadap perceraian. Beberapa lingkungan memberikan dukungan bagi keluarga bercerai, sementara yang lain cenderung memberikan stigma, yang dapat memengaruhi kenyamanan anak dalam menjalin komunikasi dengan orang tua non-kustodian (Alwinda & Setyanto, 2021). Dengan demikian, geografi tidak hanya berbicara tentang ruang fisik, tetapi juga jaringan sosial dan budaya yang membentuk dinamika hubungan dan komunikasi keluarga setelah perceraian.

2.2. Perceraian sebagai Fenomena Sosial dalam Kehidupan Keluarga

Perceraian merupakan peristiwa sosial yang membawa dampak besar pada struktur, fungsi, dan dinamika internal keluarga. Ketika perkawinan berakhir,

perubahan tidak hanya terjadi pada hubungan suami–istri, tetapi seluruh sistem keluarga mengalami transformasi. Anak menjadi pihak paling rentan karena harus menyesuaikan diri dengan perubahan emosional, aturan keluarga yang baru, serta suasana rumah yang sering kali tidak stabil. Penelitian Andys Tiara & Rita Pranawati (2023) menunjukkan bahwa anak korban konflik keluarga cenderung mengalami tekanan yang muncul akibat ketegangan relasi, ketidakpastian pengasuhan, dan perubahan pola komunikasi dalam kehidupan sehari-hari (Tiara & Pranawati, 2023: 3). Kondisi ini memengaruhi kemampuan anak memahami situasi keluarga sekaligus menuntut mereka untuk mengembangkan bentuk adaptasi baru dalam menghadapi dinamika pasca perceraian.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, perceraian masih sering disertai stigma sosial dan dianggap sebagai kegagalan institusi keluarga. Stigma ini menambah tekanan emosional pada anak, terutama ketika mereka terjebak dalam konflik berkepanjangan antara kedua orang tua. Luluk Fikri Zuhriyah (2021) menemukan bahwa remaja korban broken home kerap mengalami kegamangan emosional akibat hubungan yang renggang dengan salah satu atau kedua orang tua, serta tekanan untuk memihak salah satu pihak (Zuhriyah, 2021: 268). Dampak stigma ini bukan hanya pada kondisi psikologis anak, tetapi juga pada rasa aman dan kestabilan identitas mereka. Situasi menjadi lebih kompleks ketika anak harus menghadapi dinamika sosial yang tidak selalu memberikan dukungan terhadap kondisi keluarga mereka.

Konflik yang terjadi sebelum perceraian sering berlanjut setelahnya,

memperburuk kondisi psikologis anak karena mereka harus menavigasi hubungan orang tua yang masih dipenuhi ketegangan. Alwinda & Setyanto (2021) menegaskan bahwa komunikasi antarpribadi orang tua–anak pasca perceraian sering dipengaruhi oleh konflik orang tua, sehingga anak mengalami kebingungan dalam menentukan sikap, menjaga hubungan, serta menetapkan batasan percakapan tertentu (Alwinda & Setyanto, 2021: 247). Ketegangan ini membuat anak menahan diri, menggunakan pola komunikasi selektif, dan menghindari topik yang dapat memicu konflik. Dalam proses tersebut, anak juga mengalami kerinduan emosional, terutama jika kehilangan akses rutin dengan salah satu orang tua. Santrock (2011) menyatakan bahwa anak yang kehilangan akses rutin dengan ayah cenderung mengalami kerinduan emosional berkelanjutan yang mendorong mereka untuk menjaga hubungan melalui berbagai cara alternatif (Santrock, 2011: 112).

Selain dampak emosional dan relasional, perceraian juga membawa perubahan signifikan dalam lingkungan sosial anak. Hubungan dengan keluarga besar dapat terganggu karena adanya ketegangan antarkeluarga, padahal dukungan keluarga besar dalam budaya Indonesia memiliki peran penting. Papalia (2014) menjelaskan bahwa rasa kehilangan berlapis kehilangan figur orang tua sekaligus kehilangan kedekatan dengan keluarga besar dapat memperburuk kondisi psikologis anak pada fase penyesuaian pasca perceraian (Papalia, 2014: 455). Pada saat yang sama, perubahan rutinitas sehari-hari seperti pengaturan waktu tinggal, jadwal pertemuan dengan orang tua non-kustodian, atau perpindahan tempat tinggal menuntut anak untuk terus beradaptasi. Alwinda & Setyanto (2021)

menyebutkan bahwa perubahan ini dapat menurunkan rasa keterhubungan emosional anak–orang tua (Alwinda & Setyanto, 2021: 249), sehingga semakin menambah kompleksitas relasi pasca perceraian.

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam memperkuat atau memperberat situasi anak setelah perceraian. Berkurangnya pendapatan keluarga sering menciptakan ketegangan baru, perubahan standar hidup, dan kekhawatiran mengenai pemenuhan kebutuhan dasar. Anak yang menyadari perubahan ini mungkin merasakan beban emosional tambahan meskipun mereka belum memahami sepenuhnya konteks ekonomi keluarga. Papalia (2014) menegaskan bahwa perubahan status ekonomi merupakan salah satu faktor risiko terbesar yang memengaruhi kesejahteraan anak pasca perceraian (Papalia, 2014: 457). Kondisi ini dapat memperburuk konflik emosional dalam rumah dan mendorong munculnya fenomena seperti parentification, di mana anak mengambil peran emosional yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Menurut Santrock (2011), parentification dapat menciptakan beban perkembangan yang tidak sesuai usia dan berdampak pada kesehatan mental jangka panjang (Santrock, 2011: 115). Dengan demikian, perceraian tidak hanya memengaruhi hubungan keluarga secara langsung, tetapi juga menciptakan rangkaian tekanan emosional, sosial, dan ekonomi yang saling terkait dan membentuk pengalaman anak secara keseluruhan.

2.3. Perubahan Struktur Pengasuhan dan Pola Relasi Orang Tua–Anak

Setelah perceraian, struktur keluarga mengalami perubahan yang signifikan, terutama karena pengasuhan beralih menjadi tanggung jawab satu orang tua. Ibu atau ayah yang mendapat hak asuh harus menangani seluruh

kebutuhan anak, mulai dari pengaturan aktivitas harian, keputusan pendidikan, hingga dukungan emosional. Situasi ini berlangsung ketika kondisi psikologis orang tua dan anak belum sepenuhnya stabil akibat dampak emosional dari perceraian (Rahman et al., 2024). Dalam kondisi tersebut, pola komunikasi keluarga mengalami penyesuaian. Orang tua pengasuh memegang peran dominan dalam mengatur kontak anak dengan mantan pasangan. Ketika perceraian disertai konflik, komunikasi anak dengan orang tua non-kustodian sering terbatas atau terjadwal secara ketat, termasuk pengaturan intensitas interaksi melalui pertemuan langsung maupun media digital.

Pembatasan komunikasi ini paling sering berdampak pada hubungan anak dengan ayah sebagai orang tua non-kustodian. Frekuensi bertemu yang menurun menyebabkan kedekatan emosional melemah, dan komunikasi yang jarang membuat interaksi menjadi kaku serta kurang spontan dibandingkan masa sebelum perceraian. Meskipun demikian, anak tetap membutuhkan kehadiran emosional orang tua non-kustodian dan sering mencari cara alternatif untuk menjaga hubungan, seperti pesan singkat atau kontak melalui media digital. Di sisi lain, hubungan dengan orang tua pengasuh juga berubah karena interaksi harian menjadi lebih intens. Ketika beban pengasuhan menumpuk, komunikasi dapat menjadi lebih singkat, tegang, atau sensitif sehingga memunculkan gesekan kecil berulang. Dalam situasi tersebut, anak belajar menyesuaikan ekspresi dan perilakunya agar komunikasi dengan orang tua pengasuh tetap harmonis (Bakhita, 2024).

Perubahan otoritas pasca perceraian turut memengaruhi pola relasi dalam

keluarga. Orang tua pengasuh memiliki kontrol penuh terhadap keputusan, rutinitas, dan komunikasi anak dengan orang tua non-kustodian. Hal ini menimbulkan dilema emosional bagi anak yang ingin menjaga hubungan dengan kedua orang tua, namun harus menyesuaikan diri dengan batasan yang ditetapkan pengasuh utama. Ketika beban pengasuhan sepenuhnya berada pada satu orang tua, keseimbangan perhatian sering tidak stabil sehingga berpengaruh pada kebutuhan emosional anak. Kondisi ini dapat menciptakan dinamika komunikasi yang sensitif, karena anak harus mengatur cara berbicara, waktu berbagi cerita, dan ekspresi perasaan agar tidak memicu ketegangan. Situasi semacam ini dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada pola kedekatan anak dengan kedua orang tuanya (James, 2018).

Pada aspek psikologis, anak sering menghadapi dilema moral saat berhubungan dengan orang tua non-kustodian. Mereka dapat merasa bersalah ketika menikmati waktu bersama salah satu orang tua, tetapi tetap membutuhkan dukungan emosional dari keduanya. Konflik ini memengaruhi cara anak berkomunikasi. Anak dapat menjadi lebih berhati-hati, memilih kata-kata secara selektif, atau membatasi cerita yang mereka sampaikan kepada masing-masing orang tua. Sementara itu, rutinitas harian yang hanya dikelola oleh satu orang tua membuat komunikasi keluarga sering dipengaruhi kelelahan, jadwal padat, dan kebutuhan pengasuh yang tidak selalu seimbang. Anak yang harus menyesuaikan diri dengan tekanan ini cenderung menjadi mandiri lebih cepat, namun risiko kelelahan emosional juga meningkat karena minimnya ruang untuk mengekspresikan diri secara bebas.

2.4. Konflik Pasca Perceraian dan Tekanan Loyalitas pada Anak

Konflik yang berlangsung setelah perceraian sering kali tidak berhenti pada hubungan antara ayah dan ibu, melainkan turut memengaruhi kualitas interaksi mereka dengan anak. Ketegangan berupa kemarahan, kekecewaan, maupun luka emosional menciptakan suasana relasional yang tidak stabil, menempatkan anak dalam posisi yang sulit karena harus menjaga keseimbangan emosional kedua orang tua. Dalam dinamika rumah tangga pasca perceraian, batasan baru, aturan spontan, dan perubahan suasana hati orang tua yang sulit diprediksi membuat anak mengalami tekanan loyalitas. Anak merasa seolah harus “memihak”, terlebih ketika komentar negatif, larangan bertemu, atau ekspresi ketidaknyamanan muncul saat mereka menyebut nama orang tua lainnya. Kondisi ini membuat anak belajar menahan diri, memilih kata-kata yang aman, dan menghindari topik tertentu, sehingga proses adaptasi komunikasi mereka menjadi sangat menguras energi emosional karena tidak didukung oleh interaksi keluarga yang stabil (Hadyani & Indriana, 2018: 308).

Tekanan loyalitas tersebut semakin kuat ketika pembatasan hubungan dengan orang tua non-kustodian terjadi, terutama ayah. Dalam beberapa kasus, ibu sebagai pengasuh utama menahan kontak tersebut—baik karena pengalaman pribadi yang menyakitkan, kekhawatiran terhadap keamanan anak, atau konflik yang belum selesai—sehingga pembatasan tidak selalu disampaikan secara langsung, tetapi terlihat melalui nada kecewa, sikap dingin, atau perubahan aturan mendadak setiap kali ada rencana pertemuan. Ketika akses dengan ayah dibatasi, kedekatan emosional yang sebelumnya terjalin perlahan memudar dan anak

kehilangan kesempatan membangun hubungan yang seimbang (Fauzi, 2020: 22). Situasi ini berdampak pada proses penerimaan diri anak terhadap perceraian orang tua. Banyak anak merasa marah, kecewa, bingung, bahkan menyalahkan diri sendiri, dan ketika konflik orang tua terus berlangsung tanpa ruang aman bagi anak untuk mengungkapkan emosi, mereka memasuki fase internalisasi tekanan, yaitu berusaha memahami keadaan tanpa dukungan emosional yang memadai (Hadyani & Indriana, 2018: 308).

Dalam jangka panjang, tekanan loyalitas yang berulang dapat memunculkan perasaan bersalah yang mendalam pada anak. Mereka khawatir bahwa menjaga hubungan dengan ayah berarti melukai perasaan ibu, sementara terlalu dekat dengan ibu seolah memutuskan ikatan dengan ayah. Kebingungan ini mendorong anak mengambil posisi “netral”, meski posisi tersebut sebenarnya menyakitkan karena mereka harus menekan kebutuhan emosionalnya sendiri. Wulandari & Fauziah (2019: 4) menemukan bahwa anak broken home sering menunjukkan gejala kecemasan sosial akibat tekanan dua arah semacam ini. Pada saat yang sama, konflik pasca perceraian memengaruhi keterbukaan diri anak. Banyak yang memilih untuk tidak menceritakan perasaannya—entah kepada ibu atau ayah—karena takut memperburuk keadaan. Anak belajar bahwa mengungkapkan kerinduan kepada ayah dapat membuat ibu tersinggung, sementara berbagi kesulitan hidup dengan ibu dapat membuat ayah sedih. Proses ini mendorong anak membangun batas emosional terhadap kedua orang tuanya (Gainau, 2009: 98).

Tekanan loyalitas yang berkelanjutan tidak hanya memengaruhi

komunikasi dalam rumah, tetapi juga hubungan sosial anak di luar keluarga. Anak yang memikul beban emosional terlalu besar cenderung menarik diri, sulit membangun kepercayaan, dan menjadi sangat sensitif terhadap penolakan atau konflik kecil karena mereka terbiasa hidup dalam suasana penuh ketegangan. Temuan Savitri dan Zuhdi (2022: 160) menunjukkan bahwa interaksi sosial anak broken home sering terganggu oleh pola hubungan keluarga yang tidak stabil. Konflik yang terus berlangsung juga dapat mengganggu pembentukan konsep diri yang sehat. Anak mungkin mempertanyakan nilai dirinya, merasa tidak layak dicintai, atau menganggap konflik sebagai bagian normal dari hubungan. Ketika anak tidak memiliki figur emosional yang stabil, mereka dapat mengembangkan pola pikir defensif dalam menjalin hubungan sosial (Irani & Laksana, 2018: 687). Tekanan loyalitas semakin kuat ketika anak merasa perlu menahan diri, memilih kata-kata aman, dan menghindari topik tertentu demi menjaga perasaan kedua orang tua—sebuah proses adaptif yang berat secara emosional (Hadyani & Indriana, 2018: 309).

Dalam kondisi yang lebih berat, konflik pasca perceraian mendorong anak menjalin komunikasi secara diam-diam dengan salah satu orang tua, biasanya ayah, sebagai cara memenuhi kebutuhan emosional tanpa memicu ketegangan dengan ibu. Pola komunikasi seperti ini menimbulkan beban psikologis tambahan, karena anak harus berhati-hati agar hubungan tersebut tidak diketahui sehingga meskipun ikatan dengan orang tua non-kustodian dapat bertahan, cara ini menciptakan pola interaksi yang tidak sehat dan penuh tekanan (Fauzi, 2020: 23). Secara keseluruhan, tekanan loyalitas akibat konflik pasca perceraian

menunjukkan bahwa anak bukan hanya saksi perpecahan orang tua, tetapi juga penyangga emosi keluarga, sebuah peran yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Kondisi ini berdampak pada cara anak membangun kelekatan, kepercayaan, dan komunikasi, sehingga masa pasca perceraian menjadi periode yang kompleks dan melelahkan secara psikologis (Rahman et al., 2024). Ketika anak terbiasa menyaksikan pertengkaran, komentar negatif, atau perbedaan perlakuan dari ayah dan ibu, mereka menginternalisasi pola relasi ini sebagai normal, dan dampaknya terbawa dalam cara mereka memandang hubungan keluarga maupun sosial di masa mendatang.

2.5. Komunikasi Interpersonal dalam Hubungan Anak dengan Orang Tua Pasca Perceraian

Komunikasi interpersonal menjadi aspek penting dalam hubungan anak dengan orang tua pasca perceraian karena setiap interaksi membawa beban emosional yang tidak kecil. Perceraian mengubah dinamika relasional yang sebelumnya stabil menjadi lebih sensitif, sehingga komunikasi verbal dan nonverbal menjadi sarat makna. Anak harus membaca ekspresi wajah, nada suara, serta suasana emosional orang tua untuk menyesuaikan cara berbicara maupun bereaksi. Dalam situasi seperti ini, komunikasi bukan sekadar pertukaran pesan, tetapi juga strategi bertahan di tengah ketegangan keluarga yang berubah, terutama saat anak berusaha mempertahankan stabilitas relasi di lingkungan keluarga yang penuh transisi.

Dalam hubungan anak–ibu, komunikasi interpersonal sering terjadi dalam konteks pengasuhan yang lebih intens karena pengasuh utama biasanya membawa

beban emosional lebih besar setelah perceraian. Kondisi ini memengaruhi pola interaksi sehari-hari sehingga anak menjadi lebih berhati-hati ketika berbicara, memilih kata-kata yang aman, dan menghindari topik yang berpotensi memicu reaksi emosional. Pola ini menunjukkan adanya penyesuaian yang dilakukan anak untuk menjaga keharmonisan meskipun kondisi psikologis ibu tidak selalu stabil (Simanjuntak & Latuhihin, 2023: 52). Dalam proses ini, anak menggunakan kemampuan membaca “kode-kode emosional” untuk menentukan kapan dan bagaimana mereka dapat berkomunikasi dengan aman.

Komunikasi interpersonal juga menjadi sarana bagi anak untuk menjaga hubungan emosional dengan orang tua yang tidak tinggal bersama, seperti ayah. Interaksi dengan ayah sering diwarnai kerinduan karena keterbatasan waktu bertemu sehingga komunikasi berlangsung singkat, tidak rutin, dan terkadang harus dilakukan secara diam-diam agar tidak memicu ketegangan dengan orang tua pengasuh. Ketika komunikasi itu dapat terjadi, percakapan menjadi lebih emosional karena anak mencoba memaksimalkan waktu untuk mengekspresikan perasaan atau sekadar mendengar suara ayah. Pola ini menunjukkan bentuk kelekatan yang tetap dipertahankan anak meskipun situasi keluarga tidak sepenuhnya mendukung (Paramitha et al., 2020: 14). Keterbatasan akses ini membuat setiap percakapan memiliki nilai emosional yang besar bagi anak.

Dalam konteks perceraian yang penuh konflik, komunikasi interpersonal dapat berubah menjadi ladang ketegangan yang memicu perubahan perilaku anak. Anak yang terus berusaha menghindari konflik dapat mengembangkan sensitivitas tinggi atau perilaku agresif sebagai respons terhadap relasi keluarga yang tidak

stabil (Pratama et al., 2016: 238). Selain tekanan dari dalam keluarga, lingkungan sosial yang memiliki norma tertentu terhadap perceraian juga memengaruhi cara anak berkomunikasi. Anak yang hidup di lingkungan dengan nilai kolektivitas tinggi sering menyesuaikan komunikasi mereka untuk menjaga citra keluarga, misalnya dengan membatasi percakapan tentang orang tua di depan teman atau guru (PRT & Kabanga, 2021: 92). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal anak pasca perceraian tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan intrafamilial, tetapi juga oleh konteks sosial yang lebih luas.

Pada akhirnya, komunikasi interpersonal menjadi fondasi bagi anak untuk menavigasi kedekatan, batas, dan potensi konflik dengan kedua orang tua pasca perceraian. Anak belajar menahan emosi, mengekspresikan diri secara selektif, dan menyesuaikan cara berkomunikasi agar tetap merasa aman dalam hubungan dengan ayah maupun ibu. Interaksi ini membentuk kemampuan adaptasi, empati, dan regulasi emosi yang penting bagi perkembangan mereka. Setiap percakapan, pilihan kata, dan respons anak merupakan strategi untuk mempertahankan stabilitas emosional di tengah perubahan keluarga yang tidak mudah. Dengan demikian, komunikasi interpersonal menjadi ruang utama di mana anak berusaha menjaga hubungan, kasih sayang, dan keseimbangan psikologis meskipun keluarga telah terpecah.